



IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (STUDI KASUS: BANJIR KABUPATEN ACEH UTARA 2023)

Halimatun Sakdiah^{1*}, Minami²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Geografi, FKIP, Universitas Al Washliyah Darussalam, Banda Aceh, Indonesia

*Email Koresponden: halimatunsakdiah16@gmail.com

Diterima: 05-10-2024, Revisi: 07-01-2025, Disetujui: 29-01-2025

©2025 Universitas Hamzanwadi

Abstrak Bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara tercatat sejak tahun 2018 sampai tahun 2023 terjadi cukup parah dengan ketinggian air 10-80 cm hingga 2 m. Sebagai wilayah yang sangat rentan terhadap bencana banjir maka Kabupaten Aceh Utara menjadi pusat perhatian dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai wujud peningkatan efektivitas dan keadilan dalam penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Utara. Jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif). Pengumpulan data menggunakan teknik survei, wawancara dan dokumentasi. Subjek ditentukan secara *purposive sampling*. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif persentase dan data kualitatif dianalisis menggunakan teknik interaktif model Milles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan nilai indeks rata-rata hasil jawaban responden 29,5 yang berada dalam kategori kurang. Empat indikator pengarusutamaan gender, yaitu 1) Akses, 2) Partisipasi, 3) Kontrol terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan, 4) Manfaat dari kebijakan dan program, menunjukkan ketidakseimbangan pada akses dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam penanggulangan bencana. Tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan tentang gender, resistensi pihak tertentu dan kurangnya sumber daya. Implementasi pengarusutamaan gender merupakan alat penting untuk mencapai tujuan penanggulangan bencana secara efektif demi kesetaraan dan keadilan bagi setiap orang dalam situasi bencana.

Kata kunci: implementasi; pengarusutamaan; gender; bencana

Abstract. The flood disaster in North Aceh Regency was recorded from 2018 to 2023 to be quite severe with a water level of 10-80 cm to 2 m. As an area that is very vulnerable to flooding, North Aceh Regency is the center of attention in the implementation of gender mainstreaming as a form of increasing effectiveness and justice in disaster management. This study aims to see how the implementation of gender mainstreaming in disaster management in North Aceh Regency. The type of case study research uses mixed methods (quantitative and qualitative). Data collection uses survey, interview and documentation techniques. Subjects are determined by *purposive sampling*. Quantitative data are analyzed using descriptive percentage statistics and qualitative data are analyzed using the interactive technique of the Milles & Huberman model. The results of the study showed an average index value of the respondents' answers of 29.5 which is in the less category. Four indicators of gender mainstreaming, namely 1) Access, 2) Participation, 3) Control over resources and decision making, 4) Benefits from policies and programs, show an imbalance in access and participation between men and women in disaster management. The challenges faced are lack of knowledge about gender, resistance from certain parties and lack of resources. The implementation of gender mainstreaming is an important tool to achieve disaster management goals effectively for equality and justice for everyone in disaster situations.

Keywords: implementation, mainstreaming, gender, disaster

PENDAHULUAN

Banjir menjadi salah satu bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia. Namun sampai saat ini bencana banjir merupakan suatu masalah yang butuh penanganan khusus dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat (Adhiwijaya, 2024). Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir telah menempati urutan pertama bencana terbesar yang ada di

Indonesia. Wilayah Aceh adalah salah satu wilayah di Indonesia yang rentan terhadap bencana banjir karena disebabkan oleh faktor geografis dan cuaca (Muhari, 2022). Salah satu daerah di Aceh yang mengalami peningkatan bencana banjir adalah Kabupaten Aceh Utara. Tercatat sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 Kabupaten Aceh Utara telah dilanda banjir yang cukup parah pada setiap tahun. Berdasarkan informasi dan data terbaru, pada tahun 2023 terjadi banjir di bulan Desember yang mengakibatkan sebanyak 1.173 KK atau 4.048 jiwa harus mengungsi di 18 titik aman. Selanjutnya dari hasil asesmen, banjir telah berdampak di 108 gampong yang berada di 13 Kecamatan dengan ketinggian air yang bervariasi antara 10-80 sentimeter hingga 2 meter (BPBA, 2023).

Berdasarkan fenomena bencana banjir tersebut, dalam upaya penanggulangannya hingga saat ini masih belum banyak dilakukan pengintegrasian pendekatan yang mengacu pada perspektif gender. Keluarnya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana (Perka BNPB No. 13/2014) menjadi perangkat penting mengintegrasikan pendekatan gender di bidang Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang responsif gender perlu dilaksanakan untuk memastikan pemenuhan hak dan kebutuhan laki-laki serta perempuan secara adil dan manusiawi (susiana, 2016). Perka BNPB No. 13/2014 menjadi pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah dan pihak non-pemerintah dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di bidang penanggulangan bencana dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, baik pada saat prabencana, tanggap darurat maupun pascabencana. Ada 4 (empat) indikator dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, yaitu: 1) akses; 2) partisipasi; 3) kontrol terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan; dan 4) manfaat dari kebijakan dan program.

Sebagai wilayah yang sangat rentan terhadap bencana banjir maka Kabupaten Aceh Utara menjadi pusat perhatian dalam pelaksanaan empat indikator pengarusutamaan gender sebagai wujud peningkatan efektivitas dan keadilan dalam penanggulangan bencana, hal ini bertujuan untuk memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk pulih dari bencana dan membangun komunitas yang lebih tangguh dan inklusif (Nuriana, 2020). Empat indikator pengarusutamaan gender adalah alat penting untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana diterapkan secara efektif serta mencapai tujuannya untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua orang dalam situasi bencana (Parasasri, 2021).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat permasalahan tentang penanggulangan bencana berbasis gender hingga pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana, namun pada penelitian ini mengangkat kasus banjir di Aceh Utara yang sangat intens terjadi terutama pada lima tahun terakhir sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas kehidupan yang parah. Penelitian oleh Martiany (2012) menemukan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) belum dilaksanakan secara maksimal dan harus terus ditingkatkan agar tidak menimbulkan ketimpangan gender. Selanjutnya Murtakhamah (2013) melalui penelitiannya menegaskan bahwa melalui pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan dan program, mulai dari tingkat lokal hingga nasional dapat mengatasi akar penyebab kerentanan berbasis gender serta memberikan manfaat yang adil pada laki-laki dan perempuan dalam penanggulangan bencana. Nastiti (2016) meneliti bahwa beberapa kebijakan BPBD Kabupaten Sleman masih buta gender karena tidak mencantumkan laki-laki ataupun perempuan secara khusus, terbukti dari kurangnya kebutuhan data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Sehingga tidak dapat melihat perbedaan-perbedaan gender dalam alokasi peran dan sumber daya. Penelitian terdahulu oleh Martiany dan Nastiti menggunakan metode kualitatif sedangkan Murtakhamah menggunakan metode studi literatur, selanjutnya yang membedakan penelitian ini karena menggabungkan dua pendekatan (kualitatif dan kuantitatif) guna memperkuat dan memperluas hasil penelitian. Pada penelitian ini juga melihat sejauh apa implementasi empat indikator perka BNPB tentang pengarusutamaan gender serta menawarkan/memberikan solusi pada permasalahan yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Aceh Utara dalam penanggulangan bencana, terutama melalui empat indikator yaitu: 1) akses; 2) partisipasi; 3) kontrol terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan; dan 4) manfaat dari kebijakan dan program. Dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman tentang

peran gender dalam penanggulangan bencana, mengembangkan kebijakan dan program penanggulangan yang lebih efektif, meningkatkan kesetaraan gender dan ketahanan komunitas terhadap bencana serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan adil.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenis penelitian studi kasus maka pendekatan yang digunakan adalah metode campuran (kuantitatif dan kualitatif). Penelitian kuantitatif menggunakan jenis metode survei yaitu penelitian yang berusaha untuk mengungkap opini, pendapat, dan pandangan subjek penelitian (masyarakat atau populasi lain) terhadap isu yang sedang diteliti (variabel penelitian). Melalui teknik statistik, hasil survei dapat memberikan gambaran terhadap sesuatu yang disurvei pada skala yang luas (Sanjaya, 2015). Selanjutnya penelitian metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat yang menjadi subjek penelitian secara rinci sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena yang diteliti tersebut (Sanjaya, 2015). Pendekatan kuantitatif dan kualitatif (metode campuran) dapat saling menyempurnakan dan melengkapi hasil penelitian menjadi lebih akurat (Mustaqim, 2016). Untuk pengumpulan data kuantitatif menggunakan teknik survei dengan membagikan angket/kuesioner kepada responden. Data kualitatif di dapat dengan wawancara mendalam dengan responden terkait penelitian ini. Teknik lainnya yaitu dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan dan kebijakan (Sugiyono, 2019). Dalam hal ini berupa dokumen-dokumen dari kantor pemerintahan yang terkait serta kebijakan Perka BNPB tentang pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana.

Untuk menentukan subjek penelitian yang akan menjadi responden menggunakan teknik *purposive sampling*. Penentuan subjek berdasarkan dengan pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, tidak dipilih secara acak, melainkan berdasarkan kriteria yang spesifik dan relevan dengan tujuan penelitian (Bashar, 2019). Subjek dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari pemangku jabatan, tokoh masyarakat, aktivis desa dan para korban banjir di Kabupaten Aceh Utara. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang berisi 20 butir pertanyaan dan lembar pertanyaan wawancara tentang implementasi pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan empat indikator Perka BPBD tentang pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana. Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2024 dengan lokasi penelitian di Gampong Hagu Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara, pemilihan lokasi karena Kecamatan Matangkuli adalah Kecamatan yang paling parah terkena dampak banjir. Banjir menggenangi 19 Desa dengan ketinggian air yang bervariasi (BPBA, 2023). Gampong Hagu merupakan Desa yang paling parah terkena dampak banjir dengan ketinggian air mencapai ± 2 meter.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode campuran, maka analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif persentase yaitu menggambarkan atau menjelaskan karakteristik data yang dikumpulkan untuk membuat kesimpulan yang lebih umum agar data lebih mudah dipahami dan persentase digunakan untuk menunjukkan proporsi atau bagian tertentu dari keseluruhan data. Selanjutnya kategorisasi berdasarkan kuantitatif (ordinal) yang berkaitan dengan pengelompokan data yang bersifat numerik atau kuantitatif. Data ini dapat dikelompokkan dalam kategori yang memiliki urutan atau tingkat. Kategorisasi ordinal sering digunakan untuk data yang memiliki tingkatan tertentu (Sugiyono, 2019). Sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan teknik interaktif model Milles & Huberman. Tahapan analisis data kualitatif dengan teknik interaktif model Milles & Huberman terdiri dari empat tahapan: 1) tahap pengumpulan data (*data collection*), yaitu proses pengumpulan data; 2) reduksi data (*data reduction*), yaitu upaya memilih dan memilah data, mana data yang dibutuhkan dan mana data yang tidak dibutuhkan; 3) penyajian data (*data reduction*), data kemudian disajikan dengan mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara komperhensif sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap suatu fenomena; dan 4) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion/verification*) merupakan langkah analisis yang terakhir sebagai upaya menarik kesimpulan yang tepat dari proses tahapan analisis sebelumnya (Sobirin, 2024).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengarusutamaan gender dalam bidang penanggulangan bencana dilakukan pada tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Berdasarkan hasil pengisian angket oleh 30 responden, mengacu pada empat indikator implementasi pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana maka diperoleh temuan seperti **Tabel 1** berikut:

Tabel 1. Hasil Jawaban Responden terhadap Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana

No.	Pertanyaan	Jawaban		Jumlah
		Ya	Tidak	
A. Akses				
1.	Adakah penyediaan pelatihan khusus bagi perempuan tentang manajemen bencana, kapasitas penyelamatan, dan keterampilan penting lainnya untuk meningkatkan ketahanan mereka?	2	28	30
2.	Adakah akses informasi mengenai risiko bencana dan langkah-langkah mitigasi yang dapat diakses oleh semua gender, menggunakan bahasa dan media yang mudah dipahami?	23	7	30
3.	Apakah tempat pengungsian aman dan ramah gender, dengan mekanisme perlindungan dari kekerasan berbasis gender selama dan setelah bencana?	5	25	30
4.	Apakah distribusi bantuan seperti makanan, dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik gender, termasuk kebutuhan bagi ibu hamil, menyusui atau lansia?	4	26	30
5.	Adakah penyediaan akses layanan kesehatan reproduksi dan perlengkapan kebersihan yang diperlukan untuk perempuan dan laki-laki selama masa tanggap darurat?	10	20	30
B. Partisipasi				
6.	Apakah Anda merasa bahwa partisipasi/keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam penanggulangan bencana sudah memadai?	7	23	30
7.	Adakah forum atau diskusi yang melibatkan perempuan dalam berbagi pengalaman dan masukan mengenai risiko bencana dan kebutuhan mereka, sehingga kebijakan dapat disesuaikan?	8	22	30
8.	Adakah pengumpulan data terpisah berdasarkan gender untuk memahami dampak bencana yang berbeda pada setiap kelompok dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran?	5	25	30
9.	Adakah keseimbangan perwakilan antara laki-laki dan perempuan dalam tim kaji cepat?	0	30	30
10.	Adakah perwakilan dari kelompok perempuan dalam pelatihan manajemen bencana untuk melatih keterampilan penyelamatan dan pertolongan pertama, yang dapat memberdayakan mereka untuk berperan aktif dalam situasi darurat?	1	29	30
C. Kontrol Terhadap Sumber Daya dan Pengambilan Keputusan				
11.	Selama ini, pernahkah dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana melibatkan kelompok perempuan dan kelompok marginal?	10	20	30
12.	Apakah ada anggaran khusus untuk program penanggulangan bencana yang memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki, seperti perlindungan kesehatan reproduksi dan fasilitas pengungsian yang aman?	3	27	30
13.	Apakah selama ini mekanisme distribusi bantuan melibatkan perempuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, sehingga mereka memiliki suara dalam menentukan bagaimana dan kepada siapa bantuan disalurkan?	8	22	30
14.	Pernahkah Anda diminta oleh pihak BPBD atau pihak Gampong untuk memberikan umpan balik/pendapat tentang kebijakan-kebijakan terkait gender?	3	27	30
15.	Adakah mekanisme untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul terkait pengelolaan sumber daya selama penanggulangan bencana?	20	10	30
D. Manfaat dari Kebijakan dan Program				
16.	Apakah Anda merasakan dalam rencana, strategi dan program penanggulangan bencana sudah memenuhi kebutuhan gender secara spesifik?	7	23	30
17.	Pernahkah Anda melaporkan hal-hal yang menjadi masalah kesenjangan gender dalam sebuah program kebencanaan?	18	12	30
18.	Jika Ya, apakah pada program selanjutnya permasalahan yang Anda laporkan mulai teratasi?	11	19	30
19.	Adakah identifikasi dampak positif atau negatif sebuah kebijakan dalam hal kebencanaan terhadap gender?	6	24	30
20.	Pernahkah Anda merasakan bahwa suatu program atau kebijakan dalam penanggulangan bencana mempengaruhi kelompok gender secara berbeda?	26	4	30
Jumlah		177	423	600

Sumber: Hasil analisis data penelitian, 2024

Setelah dilakukan perhitungan pada keseluruhan data angket, maka selanjutnya data yang telah diperoleh di atas akan dianalisis dengan menggunakan rumus persentase sebagai berikut (Sugiyono, 2019):

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P: Persentase

f: Frekuensi jawaban responden

n: Jumlah responden

Berdasarkan hasil perhitungan pada Gambar 1, didapatkan $f= 177$ dan n adalah total keseluruhan subjek yang digunakan maka $n= 30 \times 20 = 600$. Sehingga diperoleh nilai :

$$P = \frac{177}{600} \times 100$$

$$P = 0,295 \times 100$$

$$P = 29,5$$

Berdasarkan perolehan nilai P maka dapat dilihat kategorisasi pada **Tabel 2** di bawah ini:

Tabel 2. Pengkategorian

Nilai Indeks	Kategori
76 - 100	Sangat Baik
51 – 75	Baik
26 – 50	Kurang
0 – 25	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil analisis data didapatkan hasil 29,5 selanjutnya jika dilihat nilai indeks pada tabel pengkategorian (**Tabel 2**), maka implementasi pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Utara termasuk dalam ketegori Kurang. Temuan yang diperoleh dari perhitungan hasil jawaban responden ini dapat menjadi tolak ukur bahwa masih tingginya kesenjangan gender dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Utara. Meskipun frekuensi terjadinya banjir sangat sering namun penanggulangan bencana masih belum maksimal. Selanjutnya untuk mengetahui lebih dalam tentang implementasi pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara, maka akan dijelaskan dalam hasil wawancara dengan beberapa informan berikut ini:

Akses

Akses dalam penanggulangan bencana merujuk pada kemampuan untuk mendapatkan sumber daya, layanan, dan informasi yang diperlukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Ini mencakup berbagai aspek seperti informasi, fasilitas, layanan, sumber daya dan partisipasi. Akses ini berperan sangat efektif untuk respon yang cepat dalam pemulihan bencana. Namun berdasarkan wawancara dengan tokoh desa yang menjabat sebagai ASN di Kantor Pertanian yaitu Bapak Ali, beliau menjelaskan informasi terkait bencana khususnya banjir lebih banyak didapatkan dari pengalaman masing-masing. Jika intensitas hujan tinggi dalam waktu 2 hari maka warga sudah bersiap untuk menghadapi banjir. Hanya ada beberapa orang dari desa yang mengetahui informasi langsung dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang kemudian disebarkan ke grup-grup Whatsapp. Lanjut mengenai fasilitas dan layanan yang didapat saat ataupun setelah bencana masih kurang, tidak ada tempat khusus untuk mengungsi namun biasanya warga mengungsi di Meunasah/Musholla desa ataupun tempat-tempat yang aman lainnya. Bahkan karena frekuensi banjir yang sering terjadi banyak warga memilih untuk tetap bertahan di rumah jika banjir belum teralalu parah. Layanan kesehatan juga masih minim, tidak di semua titik pengungsian terdapat layanan kesehatan begitu pula dengan bantuan yang masih belum merata.

Menurut Sofian yang merupakan aktivis/pemuda desa, terkait informasi yang diterima mengenai peringatan resmi dari pihak kebencanaan sebelum banjir masih kurang karena menurut beliau warga memang sudah paham jika akan terjadi banjir. Fasilitas dan layanan yang diterima saat bencana masih

belum memadai, semuanya masih seadanya. Sehingga warga memang sudah menganggap banjir sebagai hal yang biasa, walaupun tetap banyak keluhan terutama akses dalam sumberdaya seperti bantuan makanan dan obat-obatan. Akses dalam hal partisipasi juga masih kurang karena pihak perempuan masih dianggap lemah dalam hal tanggap darurat saat bencana.

Jawaban selanjutnya jawaban dari Bapak Ismail yang merupakan Guru Mengaji/Imam Desa Hagu menyampaikan bahwa beliau mendapatkan informasi resmi terkait bencana banjir melalui warga yang menyampaikan karena beliau tidak memakai aplikasi Whatsapp. Mengenai fasilitas atau tempat pengungsian, beliau mendengar begitu banyak keluhan warga sehingga beliau telah membangun Balai Pengajian yang bisa digunakan sebagai tempat mengungsi pada saat terjadi bencana banjir. Beliau dan warga setempat juga menyediakan sebuah perahu sebagai alat transportasi warga menuju tempat evakuasi terutama untuk golongan rentan seperti anak-anak, lansia, wanita hamil dan orang cacat. Fasilitas dan layanan kesehatan menurut beliau juga belum memadai, sesama warga saling membantu jika ada yang butuh pertolongan. Mengenai sumberdaya bantuan, beliau juga menyampaikan bahwa kurangnya bantuan makanan dan sebagainya selama banjir terjadi.

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Khadijah istri Geuchik Desa Hagu dan Rahmi sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi, mereka menjelaskan bahwa mereka mendapat informasi terkait bencana melalui grup Whatsapp yang kemudian disampaikan kepada keluarga yang lain, baik melalui grup maupun secara langsung. Namun masalah yang paling membuat tidak nyaman adalah tempat pengungsian yang tidak memadai, mereka mengungsi di Meunasah/Musholla desa jika ketinggian air semakin naik akan tetapi saat ingin tidur atau istirahat, tidak ada pemisahan antara gender semuanya saling berdesakan mengambil tempat untuk tidur. Sehingga menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman. Untuk fasilitas dan layanan tidak semua titik pengungsian terdapat posko kesehatan, jadi mereka telah menyiapkan sendiri obat-obatan ringan seperti pereda nyeri, obat maag/diare, minyak angin dan salap gatal. Hal lain seperti makanan selama bencana terjadi mereka membangun dapur umum untuk memenuhi kebutuhan warga namun pelaksanaannya belum maksimal, karena kurangnya bahan pokok yang tersedia sehingga masih banyak warga mengeluh kekurangan konsumsi. Lanjut bahwa selama ini tidak ada pelatihan khusus bagi kaum perempuan dalam hal kebencanaan, namun hampir semua perempuan korban bencana khususnya banjir di Kabupaten Aceh Utara memiliki kemampuan dalam mengevakuasi diri dikarenakan banjir bisa terjadi 2-4 kali dalam setahun sehingga mereka dituntut untuk beradaptasi dengan keadaan untuk menyelamatkan serta melindungi diri dan keluarga. Rahmi sebagai mahasiswa pernah mengikuti pelatihan maupun sosialisai tentang kebencanaan namun bukan di desanya tapi dari kampus tempat ia kuliah namun ilmu yang didapat digunakan pada saat terjadinya bencana, walau tidak untuk semua warga namun untuk lingkungan keluarganya.

Jawaban selanjutnya dari Ibu Fatimah selaku warga biasa namun beliau memang penduduk asli yang sejak dari nenek buyut sudah menetap di Gampong Hagu, banyak berbagi pengalaman dalam menghadapi banjir. Informasi mengenai yang didapat selama ini dengan memantau situasi cuaca, beliau bisa memprediksi tanda-tanda banjir berdasarkan pengalaman beliau selama ini sehingga beliau mengetahui mana hujan yang mengakibatkan banjir atau tidak. Banyaknya permasalahan yang terjadi pada saat pengungsian membuat beliau dan keluarga memilih bertahan di rumah kecuali air semakin meninggi dan tidak bisa lagi diatasi. Selain Ibu Fatimah, beberapa warga lain juga telah membangun pondasi rumah menjadi lebih tinggi dan ada tempat khusus dalam rumah untuk mengevakuasi barang-barang serta keluarga selama ketinggian di dalam rumah masih ± 50 cm. Fasilitas dan layanan yang didapatkan masih kurang memadai karena banjir terjadi bukan hanya di satu desa melainkan hampir satu Kabupaten. Begitu pula dengan sumberdaya bantuan khususnya makanan yang didapat masih sangat kurang namun karena beliau telah terbiasa dengan keadaan ini, maka beliau selalu menyetok kebutuhan pokok jika sudah mulai masuk ke bulan-bulan terjadinya bencana banjir. Untuk akses dalam aspek partisipasi masih kurang dilibatkan pihak perempuan, hanya diwakilkan oleh pihak laki-laki.

Dari hasil wawancara mengenai indikator akses pada implementasi pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana, maka dapat disimpulkan bahwa akses informasi yang di dapat sudah baik namun dalam hal fasilitas dan layanan khususnya kesehatan masih belum memadai sama halnya seperti distribusi bantuan yang belum merata serta keterlibatan pihak perempuan juga belum seimbang. Perempuan adalah korban pertama bencana, namun pihak perempuan juga sebagai individu yang

memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengurus keluarga dan rumah tangga pada saat bencana dan pasca bencana. Sehingga program pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana sangatlah penting. Namun untuk mencapai tujuan program tersebut maka diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam penanganan bencana serta membantu korban melalui program jangka panjang yang menyeluruh termasuk mitigasi dan pencegahan bencana untuk meningkatkan ketahanan korban dengan penyediaan infrastruktur serta sosial ekonomi yang lebih baik (Reyes & Lu, 2017).

Partisipasi

Partisipasi dalam pengarusutamaan gender pada penanggulangan bencana merujuk pada keterlibatan aktif semua gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta program yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Ini mencakup beberapa aspek penting seperti keterwakilan, akses terhadap informasi, keterlibatan dalam perencanaan serta evaluasi dampak bencana. Partisipasi atau keterlibatan semua gender penting untuk memastikan kebutuhan spesifik gender dapat terpenuhi secara adil. Dengan mengintegrasikan perspektif gender, penanggulangan bencana menjadi lebih inklusif dan efektif, karena dapat mengatasi kebutuhan spesifik yang mungkin tidak terlihat jika hanya melibatkan satu gender.

Berbeda dengan keberagaman pendapat informan mengenai akses, pada indikator partisipasi jawaban informan lebih sependapat karena mereka merasakan hal yang sama dalam keterlibatan laki-laki dan perempuan. Partisipasi atau keterlibatan laki-laki dan perempuan belum memadai dalam kebencanaan, seperti contoh tidak ada perwakilan dari perempuan dalam hal kaji cepat pada saat sebelum, selama dan setelah terjadinya bencana. Namun dari pihak laki-laki di beberapa desa, setiap desa terpilih ada 7 orang kader yang mewakili untuk dilatih dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana serta penyampaian informasi langsung dari pihak BPBA. Pengumpulan data terpisah antara laki-laki dan perempuan juga belum dilakukan atau belum maksimal serta tidak ada forum khusus perempuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka yang lebih spesifik sehingga dalam pendistribusian bantuan masih kurang tepat sasaran. Forum bagi pihak perempuan penting sebagai wadah para perempuan berbagi pengalaman tentang bencana sehingga mereka bisa meningkatkan kapasitas diri dalam menghadapi bencana.

Pihak perempuan ialah kelompok korban yang paling terdampak ketika bencana namun pihak perempuan juga memiliki peranan yang penting dalam penyelamatan keluarga dan mendidik anak-anak tentang kebencanaan sehingga perlu pertimbangan penting untuk melibatkan dan mengadakan pelatihan khusus untuk perempuan dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan Laporan Survei tentang Kebakaran di Gempa Prefektur Hyogo Selatan, didapat data dari *Fire Science Society of Japan* yaitu persentase orang yang selamat karena melakukan penyelamatan mandiri sebanyak 34,9%, selanjutnya orang diselamatkan keluarga sebanyak 31,9%, diselamatkan oleh tetangga 28,1%, selanjutnya diselamatkan pejalan kaki sebanyak 2,6%, dan paling sedikit diselamatkan oleh Tim Penyelamat hanya 1,7%. Maka hal ini membuktikan bahwa kunci penyelamatan diri dari bencana adalah melalui peningkatan kapasitas diri yang dilakukan dari keluarga sejak dini (Riyanto, 2023).

Kontrol Terhadap Sumber Daya dan Pengambilan Keputusan

Kontrol terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan pada implementasi pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana merujuk pada bagaimana semua gender memiliki kesempatan yang sama dalam mengelola sumber daya dan terlibat dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan penanggulangan bencana. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ali, Sofian dan Bapak Ismail, beberapa poin penting seperti dana khusus yang di alokasikan untuk pelatihan dan fasilitas yang diperlukan untuk mempersiapkan dan merespon bencana masih belum memadai. Lebih lanjut menurut Ibu Khadijah, Rahmi dan Ibu Fatimah pengelolaan sumber daya seperti pendistribusian bantuan masih belum memenuhi kebutuhan spesifik gender maupun kelompok rentan lainnya. Keterlibatan pihak perempuan juga masih kurang dalam pengelolaan sumber daya, hanya beberapa perempuan yang menjadi perangkat desa yang terlibat dalam pendistribusian tersebut.

Dengan mengintegrasikan kontrol terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan yang sensitif gender, penanggulangan bencana menjadi lebih efektif dan adil, serta meningkatkan ketahanan masyarakat secara keseluruhan dalam menghadapi bencana serta pulih dari bencana dengan cepat.

Manfaat dari Kebijakan dan Program

Tolak ukur keberhasilan indikator manfaat dari kebijakan dan program pada implementasi pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana dapat kita lihat dengan adanya berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh semua gender dan kelompok rentan lainnya. Hasil wawancara dengan Bapak Ali, beliau menjelaskan bahwa tidak semua masyarakat korban bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara dapat merasakan manfaat tersebut. Beberapa program dalam penanggulangan bencana seharusnya bisa dirasakan manfaatnya namun hingga sekarang masih sangat sedikit program-program dalam penanggulangan bencana yang responsif gender. Selanjutnya, menurut Ibu Fatimah, beliau sering melaporkan permasalahan dan kesenjangan gender yang terjadi pada saat bencana, namun tidak semua dari permasalahan tersebut menemukan solusi. Kurangnya identifikasi dampak positif dan negatif dari sebuah program atau kebijakan sehingga tidak semua masyarakat merasakan manfaat dari program tersebut.

Tantangan yang Dihadapi dalam Mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana

Kurangnya pemahaman tentang gender, baik dari pihak pemangku kepentingan maupun masyarakat serta rendahnya pemahaman tentang pentingnya pengarusutamaan gender di kalangan pengambil keputusan dapat menghambat implementasi kebijakan yang responsif gender. Kurangnya pelatihan khusus bagi perempuan dalam penanggulangan bencana mengakibatkan perempuan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka. Selanjutnya tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya, data dan informasi serta resistensi dari pihak-pihak tertentu. Seperti dalam hal praktik budaya yang merugikan atau norma sosial yang menghambat partisipasi perempuan dapat menghalangi kemajuan dalam pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana.

Berikut beberapa gambar kondisi di tempat penelitian yaitu Gampong Hagu, Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara:



Gambar 1. a) Wawancara dengan Informan di Balai Pengajian Ustad Ismail yang menjadi tempat mengungsi saat terjadi bencana, b) Ketinggian air di Balai Pengajian (Sumber: Dokumen Peneliti, 2024)



Gambar 2. a) Batas ketinggian air di rumah Pak Ali; b) proses evakuasi warga (Sumber: Dokumen Peneliti, 2024)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara, maka dapat diketahui bahwa hasil analisis data angket jawaban responden diperoleh nilai 29,5 yang dalam pengkategorianya masuk ke dalam kategori kurang. Artinya penerapan pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Utara masih kurang. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa seringnya terjadi kesenjangan gender dalam penanggulangan bencana baik dalam akses fasilitas dan layanan, seperti tempat pengungsian yang tidak responsif gender, sumber daya yang belum memadai hingga minimnya keterlibatan/partisipasi pihak perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kebencanaan. Adapun hambatanya seperti kurangnya pengetahuan tentang gender, kurangnya pelatihan, sumber daya yang terbatas, resistensi pihak tertentu dan budaya yang menghambat perempuan untuk terlalu maju. Untuk mewujudkan pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana yang dilakukan pada tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana, maka pada setiap tahapan tersebut harus melibatkan dan mempertimbangkan kebutuhan gender secara spesifik. Selain itu penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana dapat bekerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintahan maupun non pemerintah sesuai dengan kebutuhan guna menciptakan masyarakat yang lebih adil, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan serta meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiwijaya A, Amal AA. (2024). Kesiapan Menghadapi Bencana Banjir Berbasis Gender di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. *Borneo Nursing Journal (BNJ)*, 6(1), 1-6.
- Bashar, K., Dismawati, D., Sartika, S., Annisa, N., & Yuniar, Y. (2019). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kecurangan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kelurahan Pandang Kota Makassar. *Jurnal PENA: Penelitian dan Penalaran*, 6(2), 126-136.
- BPBA. (2023). *Rekapitulasi Kejadian Bencana di Provinsi Aceh Tahun 2023*. Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
- Martiany, D. (2012). Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah). *Jurnal Aspirasi*, 2(2), 121-136.
- Muhari A. (2022). Update: Banjir Aceh Utara Meluas dan Paksa 18.160 Warga Mengungsi – BNPB. Available from: Bnpd.Go.Id <https://www.bnpb.go.id/berita/-update-banjir-aceh-utara-meluas-dan-paksa-18-160-warga-mengungsi>
- Murtakhamah, T. (2013). Pentingnya pengarusutamaan gender dalam program pengurangan risiko bencana. *Welfare Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2(1), 1-18.
- Mustaqim, M. (2016). Metode penelitian gabungan kuantitatif kualitatif/mixed methods suatu pendekatan alternatif. *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1).
- Nastiti NN, Firawati T, Prabandari EHA. (2016). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Sistem Penanggulangan Bencana di Indonesia Studi Kasus: Analisis Implementasi Renstra BPBD Kabupaten Sleman di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan. *Jurnal Dinamika Global*, 1(1).
- Nuriana, D., Rusyidi, B., & Fedryansyah, M. (2020). Mitigasi bencana berbasis sensitive gender. *Share Social Work Journal*, 9(2), 179-194.
- Parasasri, R. R. A., & Nurhaeni, I. D. A. (2021). Manajemen Bencana Responsif Gender: Kajian Inovasi Layanan Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(1), 62-81.
- Perka BNPB No. 13/2014 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam PB. Available from: <https://bnpb.go.id/berita/perka-bnpb-no-13-2014-tentang-pengarusutamaan-gender-di-bidang-pb>.

- Reyes, D. D., & Lu, J. L. (2017). Gender dimensions and women's vulnerability in disaster situations: A case study of flood prone areas impacting women in Malabon City, Metro Manila. *Journal of International Women's Studies*, 18(4), 69-88.
- Riyanto, A., Supriyati, S., Susilastuti, S., & Putra, A. S. (2023). Perempuan dalam Penanggulangan Bencana: Peran Perempuan dalam Peningkatan Kesiapsiagaan Melalui Table Top Exercise (TTX). *Jagrataru: Journal of Disaster Research*, 1(2), 59-64.
- Sanjaya. (2015). *Model Pengajaran dan Pembelajaran*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sobirin, A., Asiyah, S., & Hartono, D. P. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Geografi di SMA Negeri 5 Palembang. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 8(1), 11-20.
- Sugiyono. (2019). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet: ke 28. Bandung: Alfabeta
- Susiana S, Qodriatun SN, Andina E. (2016). Implementasi Penanggulangan Bencana yang Responsif Gender. *Jurnal Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 8(19).